

GAYA ELIQUOTARIUM WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA – DJAROT SAIFUL HIDAYAT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nadia Chandrawita

*Kantor Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
blokiproduction@gmail.com*

Abstract: Every human being has a different style of communicating. The communication style can follow the conditions and situations so that each individual can have several kinds of communication style. The quiet communication style, becomes the prominent characteristic of Djarot Saiful Hidayat (DJS), Vice Governor of DKI Jakarta Province, and this draws public attention to talk about. The purpose of this study is to determine the communication style and leadership style of Vice Governor of DKI Jakarta Province - Djarot Saiful Hidayat in forming Good Governance in the Provincial Government of DKI Jakarta. This research method is case study with qualitative research approach. This research is conducted with qualitative approach (approach) is approach that aims to explore a symptom. For data validity, researchers used triangulation of data. Triangulation, in data collection techniques, triangulation is defined as data collection techniques that combine from various data collection techniques and data sources that already exist. The research finds that, Djarot Saiful Hidayat apply The Equalitarian Style in communicating, that is two-way communication style based on equality aspect. The leadership style applied by Djarot Saiful Hidayat is a democratic type of leader, which is willing to cooperate to achieve the predetermined objectives by sharing activities that have been determined together between leaders and subordinates, in order to implement good governance.

Keywords: Communication Styles, Leadership Style, Good Corporate Governance

Abstrak: Setiap manusia memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda-beda. Gaya komunikasi pun dapat mengikuti kondisi dan situasi sehingga setiap individu dapat memiliki beberapa macam gaya komunikasi. Gaya Komunikasi yang tenang, menjadi ciri khas yang menonjol dari Djarot Saiful Hidayat (DJS), Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan hal ini menarik perhatian publik untuk diperbincangkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta – Djarot Saiful Hidayat dalam membentuk *Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Metode penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif (*approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi suatu gejala. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Hasil penelitian menemukan bahwa, Djarot Saiful Hidayat menerapkan *The Equalitarian Style* dalam berkomunikasi, yaitu gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan. Adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Djarot Saiful Hidayat adalah tipe pemimpin yang demokratis, yakni bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagi kegiatan yang telah ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan, dalam rangka mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Gaya Komunikasi, Gaya Kepemimpinan, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Gaya komunikasi yang tenang, menjadi ciri khas yang menonjol dari Djarot Saiful Hidayat (DJS), Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan hal ini menarik perhatian publik untuk diperbincangkan, gayanya sangat bertentangan jika dibandingkan dengan pasangannya

yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tidak salah jika disebut sebagai figur publik atau tokoh nasional yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini dan mengisi halaman media hampir di semua, baik lokal maupun nasional setiap hari.

Sejak menjabat Wakil Gubernur mendampingi Ahok, gaya Djarot Saiful Hidayat (DJS) sering mengundang komentar dan sering diperbandingkan dengan pasangannya tersebut, apalagi ketika menghadapi media dan warga, bahkan termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan, yang satu berkata-kata kasar, bahkan vulgar, meluncur dengan deras sementara Djarot Saiful Hidayat tampil dengan gaya elegan dan santun, sehingga dari sisi gaya berkomunikasi menarik untuk dikaji.

Track record semasa Djarot Saiful Hidayat menjabat sebagai Wali Kota Blitar diantaranya pada awal periode memimpin Kota Blitar, Djarot Saiful Hidayat (DJS) merasa birokrasi Pemerintah Kota Blitar seperti gajah yang susah bergerak dan hal itu tidak bisa dibiarkan, sehingga Djarot Saiful Hidayat langsung membuat kebijakan memperpanjang usia pensiun pejabat.

Efektivitas komunikasi organisasi yang ada di perusahaan atau instansi, diharapkan akan mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Adanya komunikasi yang sehat dan baik antara sub kerja yang satu dengan yang lain, diharapkan akan turut membantu pencapaian kepuasan kerja pegawai di dalam organisasi. Dengan adanya keterbukaan dan pengertian maka pegawai akan merasa lebih akrab dan dapat dijadikan sebagai teman diskusi. Untuk itulah pencapaian kepuasan kerja yang baik dalam sebuah organisasi diharapkan akan mampu bersaing dan tampil sebagai ciri yang mandiri, serta mampu memenangkan persaingan harus diperhatikan.

Bagaimana kondisi *Good Governance* di Indonesia? Berbagai *assessment* yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan *Good Governance*.

Sekarang, bagaimana jika gaya komunikasi kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat dikaitkan dengan prinsip *Good Governance*, apakah bisa diwujudkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Tulisan ini akan mengupas dan menganalisis gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta – Djarot Saiful Hidayat dari prinsip *Good Governance*.

KAJIAN LITERATUR

Gaya komunikasi (*communication style*) didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang di gunakan dalam suatu situasi tertentu (*a specialized set of interpersonal behaviors that are used in a given situation*). Jenis Gaya Komunikasi ada enam jenis gaya komunikasi yang sudah lazim diketahui, dimana komunikasi dibedakan sebagai berikut menurut versi Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam bukunya yang berjudul *Human Communication* (1996:115) adalah sebagai berikut : pertama yaitu *The Controlling Style* adalah gaya komunikasi mengendalikan, kedua, *The Equalitarian Style* adalah gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan, yang ketiga *The Structuring Style* adalah gaya komunikasi berstruktur yang memanfaatkan pesan verbal guna memantapkan perintah, tanggung jawab, jadwal, dan struktur, ke empat *The Dynamic Style* adalah gaya komunikasi yang dinamis dan agresif, biasanya digunakan oleh juru kampanye, marketing, dan sales, ke lima *The Relinquishing Style* adalah gaya komunikasi dengan kecenderungan memberi saran, masukan, pendapat, dan gagasan kepada orang lain,

dan yang keenam, *The Withdrawal Style* adalah gaya komunikasi yang menghindari keterlibatan dalam persoalan.

Selanjutnya dalam penulisan ini juga berkaitan dengan masalah hubungan antara atasan dan bawahan, dimana hal tersebut dapat disebut dengan komunikasi administrasi. Tentang masalah ini Effendy (1990: 32) berpendapat: “Komunikasi vertikal dari atas ke bawah (*down word communication*) dan komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya dan dari bawahan kepada atasannya secara timbal balik”. Jadi komunikasi vertikal terdiri dari dua arus yaitu arus ke bawah dan arus ke atas. Penjelasannya sebagai berikut komunikasi ke bawah, yaitu suatu penyampaian informasi baik lisan maupun tulisan, secara langsung maupun tak langsung, berupa perintah atau penjelasan umum dari atasan kepada bawahannya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Robbin (2002: 148) yang menjelaskan sebagai berikut: Komunikasi yang berlangsung dari tingkat tertentu dalam satu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah sedangkan Komunikasi ke Atas. Komunikasi ke atas yaitu suatu penyampaian informasi yang mengalir atau berasal dari staf atau bawahan kepada pimpinan atau atasan. Komunikasi ini sangat penting bagi pimpinan atau atasan untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan dari sudut pandang bawahan. Suatu hal yang bukan mustahil walaupun kinerja organisasi atau perusahaan baik, tetapi kondisi karyawan tidak nyaman. Hal inilah yang perlu diatasi seorang pemimpin melalui komunikasi dari bawah ke atas. Teori yang bisa mewakili adalah Teori dramaturgi bila disimpulkan secara singkat, teori ini memandang bahwa kehidupan manusia itu sebagai sebuah panggung sandiwara, dimana manusia memainkan peran yang ia dapat sebaik mungkin agar audience mampu mengapresiasi dengan baik pementasan tersebut. Teori dramaturgi Erving Goffman ini tidak lepas dari pengaruh George Herbert Mead dengan konsep The Self. Dramaturgi itu sendiri merupakan sumbangan Goffman bagi perluasan teori interaksi simbolik. Menurut Mead dalam (Ritzer, 2012:636) menyatakan bahwa konsep diri pada dasarnya terdiri dari jawaban individu atas pertanyaan mengenai “siapa aku” untuk kemudian dikumpulkan dalam bentuk kesadaran diri individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung. Ada juga menurut Deddy Mulyana (2005:73) bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun non verbal.

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan (*management*) bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Good governance* adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keseharian. *Good governance* juga merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*) dan sector swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan membebani perbedaan diantara mereka.

Ada sepuluh prinsip *Good Governance* sebagai berikut: Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan

kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo,2002:129). Kesetaraan Asas kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Daya Tanggap adalah Kepekaan para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Wawasan ke Depan Pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka, di sisi lain akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh (mardiasmo, 2001:251). Pengawasan publik maksudnya adalah terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Efektivitas dan efisiensi, penjelasannya sebagai berikut Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan Efektifitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko,1998:23). Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian ini adalah paradigma positivisme. Yaitu suatu keyakinan dasar yang berakar dari paham ontology realism yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi dimana secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek studi. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode studi kasus yakni merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. (Robert K. Yin , 2014:1). Key informan merupakan nara sumber dengan kriteria orang yang kredibel terkait penelitian ini, misalnya subjek penelitian dan tambahan pejabat atau aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian, atau orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Dimana kategorisasi data dan mereduksi data disusun dalam bentuk narasi, diinterpretasikan, pengambilan keputusan, verifikasi hasil analisis komparatif konstan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kategorisasi dan mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian.
- 2) Data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam bentuk narasi, agar menjadikan informasi yang bermakna sesuai dengan masalah peneliti.
- 3) Menginterpretasikan data yang diperoleh dari key informan
- 4) Pengambilan keputusan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah peneliti.
- 5) Melakukan verifikasi hasil analisis data, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat.

Teknik Analisis Keabsahan Data

Untuk teknik analisis keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi yakni pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. Sumber untuk triangulasi adalah *key informan*.
- 2) Triangulasi dokumen, yakni membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.
- 3) Triangulasi teori, yakni memanfaatkan atau memadukan dengan teori atau lebih. Dengan mencari data yang menunjang penjelasan, dan lebih pada teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mencari jawaban dari fokus penelitian tentang bagaimana “Gaya Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta – Djarot Saiful Hidayat dalam Membentuk *Good Governance* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?”. Peneliti melakukan kegiatan *interview* terhadap *key informan* dalam hal ini adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta (Djarot Saiful Hidayat). Kegiatan *interview* dilakukan di ruang kerja dan kediaman Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ada juga narasumber lainnya yang peneliti jadikan untuk tambahan dan melengkapi data hasil penelitian.

Djarot Saiful Hidayat (DJS) merupakan politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Desember 2014. Sebelumnya adalah anggota DPR RI periode 2014-2019. DJS pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar sejak 3 Mei 2000 hingga 3 Agustus 2010 dan anggota DPRD Jawa Timur sejak 1999 hingga 2000.

Sebelum berkecimpung sebagai aktivis politik, Djarot Saiful Hidayat memiliki mata pencaharian utama sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Tidak hanya sebagai dosen, ia juga merangkap tugas sebagai Pembantu Rektor I di universitas tersebut pada tahun 1997 hingga 1999.

***The Equalitarium Style* ala Djarot Saiful Hidayat**

Djarot Saiful Hidayat (DJS) yang merupakan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki gaya komunikasi pemimpin seperti *The Equalitarium style*. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. *The equalitarian style of communication* ini terlihat pada saat DJS melaksanakan tugas dan koordinasi dengan jajaran dan juga pada saat berinteraksi dengan warga, penekanan komunikasi yang disampaikan Djarot lebih ke arah komunikasi dua arah (*two-way traffic of communication*). Keterbukaan merupakan kunci dari gaya komunikasi ini, artinya, orang yang kita ajak bicara dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana rileks, santai dan informal, dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap proses komunikasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.

Djarot Saiful Hidayat berdasarkan gaya komunikasinya adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi dan dinilai dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam bermasyarakat. *The equalitarian style* ini akan lebih memudahkan tindak komunikasi dalam bertindak pada saat melaksanakan tugas, DJS mendengarkan apa yang ingin disampaikan dari pegawai ataupun masyarakat, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya, memberikan saran, bahkan mengkritisi terhadap kinerja yang sudah ia lakukan dengan jajarannya. Hal ini memperlihatkan gaya komunikasi Djarot memiliki jiwa *The equalitarian style*.

Analisis Komunikasi Antar Pribadi Melalui Manajemen Impresi Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti mencoba menarik benang merahnya terkait dengan gaya komunikasi dan kepemimpinan DJS dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut apa yang dilakukan oleh DJS ketika ingin mengetahui persoalan yang dihadapi, baik dari bawahan atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh warganya, maka DJS melakukan pendekatan dengan cara yang moderat melalui komunikasi inter personal, sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa bawahan ataupun warga merasa segan atau bahkan takut ketika berhadapan atau bertemu dengan pemimpin mereka. Hal tersebut sesuai dengan konsep tentang komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang dijelaskan Deddy Mulyana (2008:81) bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun non verbal.

Tujuan komunikasi antar pribadi adalah agar mengetahui persoalan yang dimasyarakatkan, merupakan kesempatan bagi DJS untuk memperbincangkan cara pemerintah DKI Jakarta menyelesaikan program kerjanya, dan cara sejauhmana DJS terbuka pada warganya, serta mengetahui nilai, sikap dan perilaku warganya sehingga DJS dapat menanggapi dan memprediksi tindakan warganya. Melalui pendekatan komunikasi antar pribadi juga DJS berusaha menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan warganya. Hubungan tersebut membantu mengurangi ketidakpuasan warga atas program kerja yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat umumnya.

Sementara itu, DJS juga disadari atau tidak, sudah melakukan pengelolaan kesan dirinya atau mengimplementasikan manajemen impresi (*Impression Management*) atas dirinya yakni pengelolaan kesan berkaitan dengan bagaimana warga DKI memandang DJS dengan segala atribut, yang berasal dari konsep diri yang dilakukan oleh DJS. Hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa memang tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh orang lain ketika memandang diri kita sangat berperan dalam pembentukan konsep diri kita dan bagaimana kita mengelola kesan (*impression management*). Demikian halnya, DJS menyadari bahwa ketika dirinya sadar memiliki kekuasaan dan kewenangan, maka agar warga DKI tidak merasa jauh dengan pemimpinnya, DJS memanfaatkannya dengan baik melalui pengelolaan kesan diri dan pendekatan inter personal.

Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Erving Goffman dalam Arrianie (2010:40) bahwa pengelolaan kesan melalui teorinya yang terkenal, yakni teori dramaturgi, dimana kehidupan diumpamakan sebagai teater atau drama, seolah-olah manusia berada dalam dua panggung yang berbeda, yaitu panggung depan dan panggung belakang.

Pendekatan ini berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadap dirinya. Interaksi di atas panggung yang menampilkan peran yang dimainkan oleh para pemegang peran (aktor), dalam penelitian ini aktor tersebut adalah DJS. Seringkali sang aktor melakukan pengelolaan kesan (*Impression Management*) itu tanpa sadar, namun ada kalanya juga disengaja untuk meningkatkan status sosialnya di mata orang lain, atau demi kepentingan politik.

Setiap individu yang berperan layaknya seorang pemain drama atau teater, memiliki panggung depan sebagai seorang aktor, dan panggung belakang sebagai individu sosial lainnya yang juga melakukan aktivitas seperti layaknya orang kebanyakan. Panggung depan menjadi tempat pengelolaan kesan bagi sang aktor, sehingga kesan yang penonton terima atau khalayaknya, bahwa aktor tersebut sangat kaya dan tidak pernah merasa sedih. Panggung depan yang diperankannya berhasil membawa khalayak atau penonton, bahwa kehidupan sang aktor begitu mengasyikkan. Sedangkan panggung belakang, tidak pernah ditunjukkan sang aktor di depan khalayaknya, karena itu merupakan rahasia pribadi yang tidak dikonsumsi oleh penontonnya.

Demikian halnya dengan DJS, panggung depannya adalah seorang pejabat publik, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2014-2017, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur roda pemerintahan melalui kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun DPRD DKI Jakarta dalam bentuk peraturan daerah. Sementara itu dipanggung belakangnya, DJS adalah seorang suami dari istrinya, seorang bapak dari anaknya, seorang anak dari orang tuanya, yang memiliki rasa kesal, cape dan sebagainya, seperti masyarakat pada umumnya.

Dari sisi lain DJS, bisa kita lihat melalui penampilannya yang berbusana rapih, kemudian bertingkah laku yang kalem, berwibawa, sehingga hal ini dapat membuat orang terpesona, ketika berhadapan dengan dirinya, orang bisa segan atau bisa akrab bertegur sapa dengannya. Konsep diri DJS yang positif atau baik sangat berperan dalam pengelolaan kesan panggung depan dengan sempurna. Peran DJS ketika melihat dirinya, menjadi tolok ukur bagaimana DJS mengamati warganya. Tanpa disadari, konsep diri DJS terbentuk oleh lingkungan di sekitarnya. Kepercayaan diri sangat diperlukan dalam pembentukan konsep diri yang tangguh.

Melalui komunikasi antar pribadi yang dilakukan DJS kepada warga DKI dan orang-orang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DJS menyadari betapa pengelolaan kesan dan konsep diri memegang peranan penting. Panggung depan yang dimainkan DJS dalam komunikasi antar pribadi, dilakukan dalam kerangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan jujur, untuk membangun DKI Jakarta yang lebih baik, selama kepemimpinannya bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada beberapa jurnal yang saya referensikan juga terkait dalam pembuatan jurnal ini, misalnya dari jurnal saudara M. Rahman Bobby yang berjudul political marketing dalam kampanye politik pada pasangan Darmansyah – Syahrul pada pemilihan walikota dan wakil walikota tanjung pinang, kemudian saya juga membedah jurnal dari saudari Desy Haryati dan saudara Muh. Azis dalam judul the role of leadership in bureaucracy reform dan jurnal dari saudari Lisa Waty dengan judul komunikasi alur komunikasi organisasi PT pelabuhan Indonesia IV cabang samarinda.

Namun sebenarnya, seringkali konsep diri seorang individu sudah ada dalam kepribadiannya, sehingga bilamana konsep dirinya sudah baik, yang tercermin dalam kepribadian dan kondisi kejiwaan yang baik, maka baik panggung depan maupun panggung belakang akan berperilaku baik dan men ciptakan kesan yang baik pula di mata masyarakat DKI Jakarta.

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, berikut dapat kita lihat beberapa hal mengenai gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta atau pada saat bertugas:

- **Partisipasi**

Temuan peneliti terkait dengan prinsip partisipasi bisa dilihat dari bagaimana cara pak Djarot dalam mengkomunikasikan aparat pemerintah atau pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam memberdayakan program-program kegiatan atau selalu menanyakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawainya. Hal ini tersirat dalam pernyataan Djarot Saiful Hidayat sebagai berikut :

“...Saya melakukan dialog atau berkomunikasi dengan warga, bisa dikatakan seperti blusukan, hal ini tidak saya lakukan dengan warga saja, tapi juga dengan pegawai atau ASN dilingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam hal kunjungan kerja atau sidak, dialog ini biasanya kalau untuk warga saya lakukan sampai malam hari, tapi kalau untuk pegawai, pada saat dan setelah bekerja, ngobrol-ngobrol santai saja, dari ngobrol seperti itu kan, kita bisa tau apa maunya dan apa yang menjadi keinginan mereka.”

- **Daya Tanggap**

Temuan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan prinsip daya tanggap dalam implementasi GCG di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, gesture, atau simbol visual, yang menghasilkan perubahan tingkah laku di dalam organisasi, baik antara manajer-manajer, karyawan-karyawan, dan asosiasi yang terlibat dalam pemberian ataupun mentransfer komunikasi. Hasil akhirnya adalah pertukaran informasi dan pengiriman makna atau proses aktivitas komunikasi dalam organisasi. Berikut ini penguatan penuturan Djarot pada prinsip daya tanggap sebagai berikut:

“ dengan bincang-bincang bareng sama warga kan saya jadi tahu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah warga. Lalu bisa kita kasih solusinya langsung. Warga enggak perlu nunggu lama-lama. Misalnya, aliran air bersih nggak ada, kita minta PAM Jaya untuk membereskannya. Ada pungli, kita minta instansi terkait membereskannya. Jadi langsung kan. Juga kita dapat masukan yang baik dari warga”.

“...Blusukan ke Jati Padang, saya diminta warga buat embung dan RPTRA. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengiyakan permintaan warga. Langsung saja dengan tegas saya memerintahkan jajaran untuk segera membuat embung tanpa menunggu waktu lebih lama lagi. Saya juga berpesan agar permintaan warga, khususnya di Kelurahan Jati Padang ini, segera dipenuhi. Warga Jati Padang sempat meminta dibuatkan embung di sekitar saluran penghubung (PHB) Pulo. Permintaan ini, harus diperhatikan, sebab warga mengeluh kawasan tersebut masih kerap dilanda banjir. Saya meminta agar semua jajaran tetap bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal. Hal ini terkait rentang waktu Maret-April yang menjadi puncak musim penghujan. Harus bisa kendalikan banjir, pelayanan yang baik. Tidak ada alasan karena sistem sudah kita bangun dan juga saya sampaikan agar silaturahmi antarwarga dan Pemprov DKI bisa terus diadakan. Karena dengan adanya silaturahmi, persoalan di Ibukota bisa lebih cepat ditangani...”

- **Akuntabilitas**

Salah satu dimensi kinerja yang merupakan indikator dari *good governance* adalah dimensi akuntabilitas, misalnya saja bisa kita amati dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Akuntabilitas pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang

ada di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik adalah faktor-faktor yang bisa menghambat atau menggagalkan terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Djarot melakukan pendekatan kepada bawahan maupun warga untuk selalu mengevaluasi apa yang dimaksud dari prinsip akuntabilitas ini.

Berikut merupakan pernyataan Djarot dalam melakukan pendekatan atau gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan seperti apa yang telah ia lakukan terkait prinsip akuntabilitas:

“ prinsip akuntabilitas ini sangat rentan dan merupakan salah satu yang paling cepat mendapat keluhan atau respon dari setiap program atau kegiatan yang dilakukan, karena itu saya selalu mengawasi dan melihat langsung kerja dari bawahan saya, khususnya bagi mereka yang memang ditugaskan langsung pada bagian pelayanan, intinya prinsip ini hampir sama dengan prinsip transparansi, kedua hal tersebut erat kaitannya dengan pemberian pelayanan yang optimal, baik secara langsung maupun melalui aplikasi yang Pemprov DKI Jakarta sediakan.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sisi gaya komunikasi, bahwa tipe yang diterapkan oleh Djarot Saiful Hidayat dalam berkomunikasi adalah *The Equalitarian Style* yaitu gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan. Ciri khas gaya komunikasi ini adalah adanya arus komunikasi timbal balik. Komunikasi cenderung dilakukan secara terbuka. Gaya komunikasi dua arah lebih efektif dalam membina empati dan kerja sama karena pengguna komunikasi semacam ini cenderung memiliki rasa kepedulian dan mampu membina hubungan baik dengan pihak mana pun.

Dari sisi gaya kepemimpinan, Djarot Saiful Hidayat merupakan tipe pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratik, yakni sebuah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang telah ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Gaya kepemimpinan demokratis hasilnya mungkin tidak setinggi gaya otoriter tetapi kualitasnya lebih tinggi dan terjadi komunikasi antara pemimpin dan bawahan, saling berpendapat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penghargaan hak-hak seseorang.

Dalam memimpin Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki penduduk yang heterogen, sebaiknya pejabat publik perlu memadukan gaya komunikasi yang berimbang antara kesantunan dan ketegasan, sehingga kedekatan antara pejabat publik dengan masyarakat tetap harus diberi jarak, tidak terlalu dekat tetapi juga terlalu jauh, sehingga masyarakat harus diberitahu bahwa jarak yang diciptakan bukan untuk menunjukkan kekuasaan seorang pejabat publik, tetapi masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya, memahami posisinya, memahami kapan waktu harus bersikap tenang dan kapan bersikap tegas. Djarot Saiful Hidayat harus dapat mempertahankan pola atau gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan seperti ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan gaya kepemimpinan,

sekali waktu memang tidak selalu harus bersikap demokratis, pada kondisi tertentu, pejabat publik harus bersikap tegas dan berani bertanggungjawab atas ketegasannya tersebut, karena demokratis seringkali lamban, rasa tanggungjawab kurang, keputusan yang dibuat bukan merupakan keputusan terbaik, karena harus serba musyawarah atau bahkan voting untuk sebuah kebijakan yang perlu segera diputuskan. Bagi masyarakat DKI Jakarta, harus mau realistis, mau belajar memahami, mau legowo, bahwa sebuah kebijakan publik, tidak bisa menyenangkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Boby, M Rahman. *Political Marketing* dalam Kampanye Politik Pada Pasangan Lis Darmansyah - Syahrul Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Periode 2012/2017. http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/.pdf
- Sari dan Winarno. Implementasi *e-Government system* dalam upaya peningkatan *clean and good governance* di Indonesia. (terdapat dalam jurnal JEAM vol XI no 1 tahun 2012)
- Utami, Sulistyo Seti. Gaya kepemimpinan gubernur DKI Jakarta berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (terdapat dalam jurnal Liquidity, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 160-169)
- Prasetyo, Danny dalam Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (AHOK). (Jurnal POLITIKA, Vol. 5 No. 2, Oktober 2014)
- Sabrina, Joan dalam Analisis Penerimaan Pembaca Terhadap Berita Tentang Gaya Kepemimpinan Ahok di Majalah Detik. (terdapat dalam Jurnal E-Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Univ Kristen Petra Surabaya).
- Melvani, Frecilia Nanda dalam Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Efektifitas Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. (terdapat pada Artikel Publikasi Ilmiah) <https://www.slideshare.net/MiraRizkiWijayani/komunikasi-efektif-55535481>
- Muh. Azis, Desy Hariyati. *The Role of Leadership in Bureaucracy Reform*. Organisasi International Journal of Administrative Science & Organization, May 2012 Volume 19, Number 2. ISSN 0854 - 3844, Accredited by DIKTI Kemendiknas RI No :64a/DIKTI/Kep/2010.<http://docplayer.net/46151637-The-role-of-leadership-in-bureaucracy-reform.html>
- Waty, Lisa. Komunikasi Alur Komunikasi Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan. eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2, (4): 140 – 153 ISSN 0000-0000. <http://ejournal.ilkom.fisip.unmul.ac.id>

Andika, Reggi Gita. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Lingkungan Kerja dan Komunikasi Organisasi Terhadap Komitmen Karyawan di PT X.

<https://www.scribd.com/doc/181423979/jurnal-Analisis-Pengaruh-Gaya-Kepemimpinan-Demokratis-Lingkungan-Kerja-dan-Komunikasi-Organisasi-Terhadap-Komitmen-Karyawan-PT-X-docx>

Buku

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. 2005

Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.